

BAB 6

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN

A. KONDISI UMUM

Kondisi pertahanan negara pada tahun 2005 ditandai dengan adanya beberapa kasus yang dianggap berpengaruh, mengancam wibawa dan integritas negara baik dalam lingkup internasional maupun kawasan regional. Dalam lingkup internasional, Indonesia dihadapkan pada peningkatan kerjasama militer Amerika Serikat – Australia dalam memerangi terorisme khususnya yang terjadi di London, Bali, dan Amman. Di samping mengingatkan akan pentingnya penanggulangan terorisme, kedua negara juga memberikan dukungan kepada pemerintahan yang sedang berkuasa di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia dan Filipina. Bagi Indonesia, bentuk dukungan tersebut diantaranya berupa peningkatan kerjasama militer Indonesia – Amerika Serikat dan pencabutan embargo suku cadang dan alutsista TNI. Selanjutnya Indonesia juga dihadapkan pada peningkatan peran China dan Jepang dalam memelihara keamanan kawasan. Sebagai negara yang sedang tumbuh menjadi negara maju, China secara simultan meningkatkan anggaran pertahanannya. Sementara itu, sesuai proposal Amerika Serikat tentang transformasi aliansi Amerika dan Jepang, diperkirakan akan terjadi perubahan peran pasukan bela diri Jepang dalam memelihara stabilitas keamanan kawasan.

Dalam lingkup regional, pada tahun 2006 Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan potensi konflik wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Philipina, China, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Kasus Blok Ambalat yang mengemuka pada awal tahun 2005 meskipun tidak sampai memicu perang antara Indonesia dan Malaysia, namun hal tersebut telah menimbulkan situasi yang tidak harmonis dalam hubungan kedua negara. Pengerahan sejumlah kapal perang oleh kedua belah pihak di sekitar perairan Ambalat merupakan bentuk pernyataan klaim atas blok Ambalat. Melalui kerangka kerjasama perbatasan (*General Border Committee*), kasus Ambalat secara intensif telah memasuki tahap pembahasan teknis di tingkat kementerian terkait. Selanjutnya, kasus penembakan tiga warga sipil oleh aparat keamanan Timor Leste merupakan salah satu rangkaian kasus pelanggaran perbatasan. Hal ini dapat terjadi karena aparat keamanan Timor Leste belum dapat terlepas secara total dari UNTAET sehingga seringkali bertindak di luar koridor kerjasama perbatasan (*Joint Border Committee* Indonesia – Timor Leste), sementara di sisi lain Indonesia masih berupaya menahan diri untuk tidak berbuat serupa guna mengangkat perbaikan citra Indonesia di dunia Internasional.

Dari kondisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa sistem pertahanan Indonesia tidak mungkin terlepas dari pengaruh sistem pertahanan asing baik dalam lingkungan internasional maupun kawasan regional. Namun, masih lemahnya kondisi sistem pertahanan Indonesia mengakibatkan rendahnya daya penggentar terhadap sistem pertahanan asing yang dimanifestasikan dalam bentuk pelanggaran integritas dan kedaulatan NKRI. Meskipun embargo suku cadang dan alutsista TNI sudah dicabut oleh pemerintah Amerika Serikat, hal tersebut hanya bermanfaat bagi pengoperasian

sebagian alutsista. Pada tahun 2006 secara kuantitas belum terjadi peningkatan peralatan alutsista, mengingat kegiatan pengembangan materiil difokuskan pada peningkatan kesiapan operasionalnya. Pada saat ini kekuatan pertahanan Indonesia berada dalam kondisi "under capacity", bahkan apabila disejajarkan dengan sesama anggota negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi terbawah. Rendahnya kemampuan untuk menerapkan teknologi baru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan jaman dengan rata-rata usia lebih dari 20 tahun. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa kekuatan matra darat, kendaraan tempur berbagai jenis yang jumlahnya 1.766 unit, hanya 1.077 unit (60,99 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan motor berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 47.097 unit, yang siap dioperasikan sebanyak 40.063 unit (85,04 persen); dan pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 61 unit, hanya 31 unit (50,82 persen) yang siap untuk dioperasikan. Kekuatan matra laut, kapal perang (KRI) yang jumlahnya 114 unit, hanya 61 unit (53,51 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan tempur Marinir berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 435 unit, yang siap dioperasikan hanya 157 unit (36,09 persen); dan pesawat udara yang jumlahnya mencapai 54 unit, hanya 17 unit (31,48 persen) yang siap untuk dioperasikan. Sedangkan untuk kekuatan matra udara, pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya 259 unit, hanya 126 unit (48,65 persen) yang siap untuk dioperasikan dan peralatan radar sebanyak 16 unit, hanya 3 unit (18,75 persen) yang siap untuk dioperasikan. Dengan wilayah yang sangat luas baik wilayah daratan, laut maupun udara, maka kuantitas, kualitas serta kesiapan operasional alat utama sistem senjata (alutsista) sebesar itu sangat sulit untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara secara optimal.

Sementara itu, anggaran pertahanan sampai dengan tahun 2006 baru mencapai 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto atau 5,7 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional. Di sisi lain, Singapura sebagai negara pulau telah mengalokasikan anggaran pertahanan nasionalnya mencapai 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto atau 21 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasionalnya. Dalam periode lima tahun ke depan untuk membangun postur pertahanan pada tingkat 'minimum essential force' anggaran pembangunan pertahanan seharusnya mencapai 3 – 4 persen dari Produk Domestik Bruto. Rendahnya anggaran pertahanan ini menyebabkan upaya-upaya peningkatan kemampuan kekuatan pertahanan sangat sulit dilakukan. Padahal diplomasi luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional secara signifikan memerlukan dukungan kekuatan pertahanan yang memadai.

Meskipun masih dalam skala rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan, strategi, dan perencanaan pertahanan mulai mengarah kepada pembentukan *minimum essential force*. Alat utama sistem senjata (alutsista) TNI telah mengalami peningkatan kemampuan meskipun belum sampai memenuhi kebutuhan minimal. Peningkatan kemampuan alutsista TNI lebih banyak dibangun melalui perpanjangan usia pakai yang dilaksanakan melalui *repowering* atau *retrofit*. Hal ini akan dilanjutkan pada tahun 2007 sebagai langkah yang strategis dalam upaya mengoptimalkan alutsista yang tersedia. Selain dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah, hal tersebut merupakan langkah yang lebih murah apabila dibandingkan dengan pembelian alutsista baru. Pembelian alutsista baru secara selektif hanya dilaksanakan untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak dapat dioperasionalkan dan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan teknologi pertahanan. Di samping itu, upaya modernisasi

alutsista, khususnya pertahanan udara, mulai dicari kemungkinan memanfaatkan teknologi Rusia yang modernitasnya setingkat dengan teknologi Eropa dan Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan sehubungan dengan embargo alutsista berkepanjangan dari Amerika Serikat terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste. Upaya pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri juga mulai meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas produk peralatan militer.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara yang menganut sistem pertahanan negara semesta. Antusias masyarakat untuk turut serta dalam mempertahankan wilayah khususnya pada masalah perbatasan, mengindikasikan masih tingginya semangat bela negara. Namun, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan belum dapat terarah dengan baik karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan. Di sisi lain, dibutuhkan biaya yang besar untuk melatih dan mendidik masyarakat sehingga siap untuk dikerahkan dalam sistem pertahanan. Oleh karena itu, pada tahun 2007 peran aktif dari para tokoh masyarakat dan agama diharapkan semakin meningkat seiring dengan upaya peningkatan kegiatan bela negara bagi pemuda dan masyarakat di daerah rawan konflik dan wilayah perbatasan.

Berkenaan dengan kondisi umum tersebut di atas, maka tantangan yang dihadapi pembangunan nasional tahun 2007 adalah bagaimana memenuhi kebutuhan alutsista TNI untuk meningkatkan kemampuan pertahanan pada tingkat *minimum essential force* yang tidak harus selalu menggantungkan alutsista luar negeri. Selanjutnya, bagaimana dengan skala kekuatan minimum tersebut alutsista yang ada mampu dimanfaatkan untuk operasi militer selain perang seperti operasi bakti, evakuasi atau rehabilitasi bencana alam serta di masa krisis mampu meredam berbagai ancaman pertahanan baik yang berasal dari dalam negeri maupun ancaman luar negeri. Selain itu, upaya mendayagunakan potensi pertahanan negara dengan meningkatkan peran aktif masyarakat masih menghadapi beberapa kendala, khususnya kendala dari aspek legalitas dan aspek finansial.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan kemampuan pertahanan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya sistem dan strategi pertahanan yang mampu mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara guna menjaga keutuhan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI untuk mencapai tingkat *minimum essential force*.
3. Meningkatnya penggunaan alutsista produksi industri dalam negeri sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri pertahanan nasional.
4. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan selain perang.
5. Teroptimasinya anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan dengan selesainya reposisi bisnis TNI.

6. Meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutama kecukupan perumahan, pendidikan dasar keluarga prajurit, dan jaminan kesejahteraan akhir tugas.
7. Terdayagunakannya potensi pertahanan dan meningkatnya peran aktif masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan pertahanan.
8. Meningkatnya kondisi keamanan dalam negeri, serta tegaknya kedaulatan dan terjaganya keutuhan wilayah NKRI.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007

Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Penajaman dan sinkronisasi kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan, serta penguatan koordinasi dan kerjasama diantara kelembagaan pertahanan dan keamanan.
2. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNI yang mencakup dimensi alutsita, sistem, materiil, personil, serta prasarana dan sarana.
3. Peningkatkan penggunaan alutsista produksi dalam negeri sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri pertahanan nasional.
4. Peningkatan peran aktif masyarakat dan profesionalisme institusi terkait dengan pertahanan negara.
5. Pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal.
6. Pengembangan sistem asuransi prajurit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota TNI.
7. Mengoptimalkan dan meningkatkan anggaran pertahanan menuju rasio kecukupan secara simultan dengan penataan bisnis TNI.